PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN

Raisa Wisudawati

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Development Planning in District. This research was motivated by the realization of the problems of development activities at the district level have been realized not based on the results of the plenary musrenbang district level. While the bottom-up planning system all look more transparent. The purpose of this study was to analyze the implementation of the planning pembangunan and what factors influence the process of implementation. The method used is descriptive method with qualitative approach, the scope of the District Fifty Pekanbaru, using informants from Lurah, Head, Community Leaders, SKPD and DPRD Pekanbaru. Collecting data using interview techniques and the data were analyzed with a qualitative approach. Based on research to know the implementation process in the District Development Planning Fifty, is sufficient in accordance with applicable regulations which adheres to the principle of bottom-up planning. But at this stage of the termination of the results at the municipal level by an additional proposal by the Mayor of the results of the mayor safari and also additional proposals DPRD members through the recess, so the addition of realization whereas at the district level is not recommended. Factors penghambat in carrying out development planning and even a suggestion that was not proposed by various parties appears in the realization of the construction, among others: Details technically, number of proposals and the lack of understanding in proposing, capacity, limited ability government in fulfilling the desires of the community as penjelasannya that barriers equalization public attitudes toward the proposed activity and also because of political intervention in setting activities.

Abstrak: Perencanaan Pembangunan di Kecamatan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan realisasi kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan yang terealisasi tidak berdasarkan hasil pleno dari musrenbang tingkat kecamatan. Sementara dari system perencanaan *bottom up* semua terlihat lebih transparan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan perencanaan pembangunan dan faktor apa saja yang mempengaruhi proses pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, lingkup Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, menggunakan informan dari Lurah, Camat, Tokoh Masyarakat, SKPD dan DPRD Kota Pekanbaru. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan data dianalisis dengan pendekatan Kualitatif. Berdasarkan penelitian di ketahui proses pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Lima Puluh, sudah cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang menganut azas *bottom up planning*. Namun pada tahapan keputusan hasil di tingkat Kota terjadi penambahan usulan oleh Walikota yakni dari hasil safari walikota dan juga tambahan dari usulan anggota DPRD melalui reses, sehingga penambahan realisasi padahal di tingkat kecamatan tidak diusulkan. Faktor penghambat dalam melaksanakan perencanaan pembangunan dan bahkan adanya usulan yang tidak diusulkan oleh berbagai pihak muncul dalam realisasi pembangunan, antara lain: Rincian secara teknis, Banyaknya usulan dan kurangnya pemahaman dalam mengusulkan, daya tampung, keterbatasan kemampuan pemerintah dalam memenuhi keinginan masyarakat sebagaimana penjelasannya bahwa kendalanya pemerataan kegiatan sikap masyarakat terhadap usulan dan juga karena intervensi penguasa dalam menetapkan kegiatan.

Kata Kunci: perencanaan pembangunan, kecamatan, Musrenbang

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk meningkatkan konsistensi antarkebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan. Selain itu juga dalam upaya meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program,

serta menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran. Kemudian meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik dan terwujudnya penilaian kinerja yang terukur, perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan RPJMD sehingga tercapai efektifitas perencanaan. Penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan daerah dilakukan dengan tujuan untuk mengefektifkan proses pemerin-

tahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat atau terarahnya proses pembangunan ekonomi dan kemampuan masyarakat dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

Penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut dilakukan melalui proses koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang Kelurahan merupakan forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan Tahun Anggaran berikutnya.

Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dilatarbelakangi oleh dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Untuk itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/RKPD) sebagai rencana tahunan.

Fungsi dilaksanakannya Musrenbang ini adalah untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan rencana kerja pemerintah dan rancangan kerja daerah, yang menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kerja pada tingkat di atasnya. Mekanisme pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan dilakukan dengan

beberapa tahapan seperti: tahapan persiapan, dimana lurah menetapkan fasilitator Musrenbang tingkat kelurahan yang terdiri dari BPD dan aparat pemerintah kelurahan. kemudian masyarakat yang terdiri dari RT/RW dan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, kepala desa menetapkan tim penyelenggara Musrenbang tingkat kelurahan dan tim melaksanakan Musrenbang tingkat kelurahan.

Prosedur berupa tahapan pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan, dimana dimulai dari pendaftaran peserta, pemaparan camat, masyarakat dan kepala desa tentang prioritas pembangunan. Kemudian pada tahapan penyusunan dan pembahasan anggaran, dimana pada tingkat desa dilaksanakan pada bulan Januari – Februari, pada tingkat kecamatan Februari – Maret) pada tingkat Kabupaten/Kota Maret – April. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku ditingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Kabupaten pada tahun berikutnya.

Begitu pentingnya konsep musrenbang dalam rangka menjamin pelaksanaan demokratisasi di Indonesia dan juga dalam rangka menjalankan amanah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan-permasalahan yang pada gilirannya membuat pelaksanaan musrenbang kurang mendapatkan respon dari masyarakat.

Konsep dasar perencanaan adalah rasionalitas, ialah cara berpikir ilmiah dalam menyelesaikan problem dengan cara sistematis dan menyediakan berbagai alternatif solusi guna memperoleh tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu perencanaan sangat dipengaruhi oleh karakter masyarakat dalam mengembangkan budaya ilmiah dalam menyelesaikan Tugas Filsafat dan Teori Perencanaan Pembangunan 2 permasalahan yang dihadapinya. Hal ini cukup beralasan karena perencanaan juga berkaitan dengan pengambilan keputusan (*decision maker*), sedangkan kualitas

hasil pengambilan keputusan berkorelasi dengan pengetahuan (*knowledge*), pengalaman (*experience*), informasi berupa data yang dikumpulkan oleh pengambil keputusan (eksekutor). Untuk lebih jelasnya dapat di lihat kembali pada kurva/grafik spatial data dan decesion.

Perencanaan akan berhadapan dengan problem mendasar yakni bagaimana teknis pengetahuan perencanaan yang efektif dalam menginformasikan aksi-aksi publik. Atas dasar tersebut maka perencanaan didefinisikan sebagai komponen yang menghubungkan antara pengetahuan dengan aksi/tindakan dalam wilayah publik. Pada prinsipnya friedmann menyatakan perencanaan harus bertujuan untuk kepentingan masyarakat banyak. Mengenai dokumen perencanaan pembangunan nasional yang selama ini dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraan adalah dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Ketetapan MPR ini menjadi landasan hukum bagi Presiden untuk dijabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan dengan memperhatikan saran DPR, sekarang tidak ada lagi.

Instrumen dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai acuan utama dalam memformat dan menata sebuah bangsa, mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Perubahan mendasar yang terjadi adalah semenjak bergulirnya bola reformasi, seperti dilakukannya amandemen UUD 1945, demokratisasi yang melahirkan penguatan desentralisasi dan otonomi daerah (UU Nomor 22/1999 dan UU Nomor 25/1999 yang telah diganti dengan UU Nomor 32/2004 dan UU Nomor 33/2004), UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, penguatan prinsip-prinsip *good governance*: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, bebas KKN, pelayanan publik yang lebih baik. Disamping itu dokumen perencanaan pembangunan nasional juga dipengaruhi oleh desakan gelombang globalisasi (AFTA, WTO, dsb) dan perubahan peta geopolitik dunia pasca tragedi 11 September 2001.

Perjalanan dokumen perencanaan pembangunan nasional sebagai kompas pembangunan sebuah bangsa, perkembangannya secara garis besar dapat dilihat dalam beberapa periode yakni : Dokumen perencanaan periode 1958-1967 Pada masa pemerintahan presiden Soekarno (Orde Lama) antara tahun 1959-1967, MPR Sementara (MPRS) menetapkan sedikitnya tiga ketetapan yang menjadi dasar perencanaan nasional yaitu TAP MPRS No.I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara, TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969, dan Ketetapan MPRS No.IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Nasional menurut Teori Tradisional Pemerintah memiliki wadah yang sangat luas dalam pembangunan. Dengan adanya keterbukaan dalam proses penyelenggaraan negara, maka pemerintah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan atau dalam pelaksanaan pembangunan, mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap setiap kebijakan pemerintah, sehingga akan terhindar terjadinya KKN dalam pemerintahan. Dengan keterbukaan berarti pemerintah atau penyelenggara negara sanggup bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan kepada rakyat. Tanggungjawab ini menyangkut masalah proses pengerjaan, pembiayaan dari segi manfaatnya bagi masyarakat, bangsa dan negara, maka terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyat yang pada gilirannya akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan nasional.

Menurut Growth (1960) teori pertumbuhan ekonomi dapat dikemukakan menjadi beberapa tahap, yaitu: *Pertama*, Tahap Masyarakat Tradisional. Masyarakat menciptakan produksi yang amat rendah sehingga pendapatan per kapita yang kurang pemerataan, di bidang pertanian sumber tenaga mesin sangat kurang maka masyarakat atau pemerintah bahan memperbaiki kondisi ekonomi sosial dan budaya berbagai ko-

munitas menginvestasikan ke dalam kehidupan bangsa, menciptakan kemampuan menjalankan bangsa. *Kedua*, Tahap Masyarakat Dewasa. Tahap masyarakat dewasa dalam arti masyarakat yang mampu memilih dan memberi respon terhadap perubahan dan mampu mengendalikan masa depannya sehingga tidak bergantung kepada pihak lain.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru atas pertimbangan daerah ini merupakan daerah yang memiliki penduduk yang heterogen dan dianggap dapat mewakili persoalan yang sedang diteliti di daerah lainnya. Permasalahannya antara lain adanya kesan masyarakat kurang semangat mengikuti kegiatan musrenbang yang diselenggarakan oleh pemerintah ini, hal ini karena mereka menganggap usulan mereka tidak pernah mendapatkan respon atau terealisasi. Kemudian banyak usulan yang ada setiap tahun dibahas ulang, namun tidak mendapatkan prioritas, dan bahkan terdapat kegiatan yang tidak diusulkan oleh masyarakat. dapat diketahui bahwa realisasi proyek pembangunan dibandingkan dengan usulan memang jauh dari apa yang diinginkan oleh masyarakat sebagaimana dari jumlah usulan yang disampaikan pada pelaksanaan kegiatan musrenbang. Bahkan ada realisasi kegiatan yang tidak diusulkan melalui musrenbang tersebut.

METODE

Dalam menganalisis kebijakan musrenbang, apabila dilihat dari tingkat eksplanasinya maka dikelompokkan ke dalam jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif dan dengan metode deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui kegiatan wawancara, antara lain data tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan yang ditanyakan kepada pihak yang berpentingan dalam perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan. Informan tingkat kelurahan yang berjumlah masing-masing 2 orang sebagai responden, Lurah, LPM, RT, RW, Tokoh Masyarakat dan kelompok masyarakat. Setiap data yang diperoleh baik melalui

wawancara, observasi maupun dokumen dicatat secara tertulis untuk mendapatkan informasi yang sah sebagaimana adanya. Data skunder adalah data yang diperoleh dari instansi dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari kantor camat lima puluh langsung berupa data tentang kegiatan perencanaan pembangunan, kegiatan realisasi pembangunan dan data kependudukan serta data organisasi di kecamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Proses Pelaksanaan Musrenbang

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan kota di wilayah kecamatan, yang dikoordinasikan oleh Bappeda kota dan dilaksanakan oleh Camat.

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan, yang dikoordinasikan oleh Bappeda kota dan dilaksanakan oleh Camat. Pelaksanaan dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan.

Penetapan Skala Prioritas

Keluaran yang dihasilkan adalah: Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut SKPD atau gabungan SKPD yang akan disampaikan pada Musrenbang Kota Pekanbaru. Selanjutnya, daftar tersebut diinformasikan kepada masyarakat di masing-masing Kelurahan oleh para delegasi yang mengikuti Musrenbang Kecamatan Kompilasi Hasil Musrenbang Kelurahan; Kompilasi hasil musrenbang kelurahan menurut urutan prioritas yang disepakati di musrenbang kelurahan, dan

dikelompokkan menurut SKPD. dapat diketahui dari pernyataan yang diperoleh bahwa setiap pelaksanaan musrenbang ada saja pihak-pihak yang tidak setuju dengan usulan yang diajukan karena tingkat kepentingan masing-masing usulan masih dianggap belum prioritas oleh pihak lain.

Perbedaan Pendapat dalam Menetapkan Skala Prioritas

Konflik pasti ada, tetapi hanya terbentuk perbedaan argumentasi dari masing-masing peserta, dan tuntutan-tuntutan yang memang diharapkan agar susulan mereka diterima. Dalam berdemokrasi terjadinya pertengkaran sesuatu yang biasa terjadi dalam musrenbang baik di kecamatan maupun di kota sepanjang yang diperdebatkan itu untuk kepentingan masyarakat dan tidak untuk memperjuangkan kepentingan segelintir elit dan konglomerat.

Keterwakilan Usulan dalam Prioritas

Aspek keterwakilan kelompok masyarakat dan aspek keterwakilan perempuan (gender) selalu dipertimbangkan dalam menerima usulan. Bias saja keterwakilan dari masyarakat tertentu saja yang mengusulkan tanpa memandang kelompok masyarakat lainnya. Perwakilan yang diundang biasanya cukup memiliki kredibilitas yang baik dan mampu mewakili berbagai kalangan tetapi biasanya karena usulannya pada tahun yang lalu merasa tidak terakomodir maka hal itu membuat animo masyarakat untuk datang itu sangat sedikit karena merasa pesimis terlebih dahulu. Aspek keterwakilan usulan pada prinsipnya setuju. Aspek keterwakilan dalam musrenbang: LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Organisasi kemasyarakatan (RT/RW, Tomas/Tokoh masyarakat, Tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, PKK, dll), Lembaga pendidikan yang ada dan Para Upika (unsur Pimpinan kecamatan). Perwakilan yang diundang dan hadir dirasa cukup mewakili berbagai kalangan masyarakat tertentu, biasanya animo kehadiran pihak-pihak yang merasa usulan mereka tidak terakomodir sangat kecil bahkan tidak hadir.

Proses Penetapan Hasil

Proses penetapan usulan dilakukan mulai

dari hasil pleno di tingkat kecamatan dan selanjutnya dilakukan penetapan hasil di tingkat kota, setelah dilaksanakan kegiatan penetapan realisasi usulan yang menjadi prioritas kegiatan di tingkat kota, maka selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatannya. Pada kenyataannya dalam pelaksanaannya masih terdapat tambahan usulan yang diusulkan langsung dan merupakan intervensi dari pemerintah itu sendiri yaitu dari hasil safari walikota dimana masyarakat mengusulkan langsung kepada walikota dan selain itu hasil reses anggota dewan yang diusulkan masyarakat berdasarkan reses. Adanya faktor intervensi dan juga usulan yang langsung diusulkan oleh anggota dewan dan juga walikota, sehingga adanya usulan yang tidak diusulkan dari tingkat kelurahan muncul di tingkat kecamatan.

Persoalan reses anggota dewan dan safari ramadhan walikota ke masyarakat, kondisi ini menyebabkan kegiatan yang tidak diusulkan oleh masyarakat namun mendapatkan skala prioritas dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan musrenbang yang dilaksanakan di tingkat kelurahan pada hakekatnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana utusan merupakan utusan dari perwakilan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan dalam pelaksanaannya sudah efektif. Namun dalam penetapan kegiatan prioritas yang dilaksanakan di tingkat kecamatan berbeda dengan apa yang diperoleh di tingkat kota. Hal ini disebabkan adanya intervensi dari walikota dan anggota dewan dengan memasukkan usulan langsung kepada prioritas yang ditetapkan pada tingkat kecamatan Lima Puluh.

Faktor yang Penghambat Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Faktor penghambat dalam melaksanakan perencanaan pembangunan dan bahkan adanya usulan yang tidak diusulkan oleh berbagai pihak muncul dalam realisasi pembangunan. Berikut ini beberapa penghambat dalam melaksanakan perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Rincian usulan secara teknis, beberapa tanggapan dari SKPD mengenai masih lemahnya rincian kegiatan dengan perincian Kasi PMK membuat dengan jelas prioritas dan penuh catatan-catatan, agar pembanguna dari Lurah

A, Lurah B, Lurah C, menjadi satu kesatuan dan menjadi ketergantungan.

2. Banyaknya usulan dan kurangnya pemahaman dalam mengusulkan, berdasarkan wawancara dengan RT/RW dijelaskan banyaknya pemerintah dan masyarakat untuk diprioritaskan. Kendala yang dihadapi biasanya tidak begitu signifikan hanya cara menyusun skala prioritasnya saja pada penjelasan secara terinci. Kendala yang biasa dihadapi adalah banyak nyanusulan yang masuk dari kelompok masyarakat sehingga sulit memprioritaskannya.
3. Daya tampung, keterbatasan kemampuan pemerintah dalam memenuhi keinginan masyarakat
4. Sikap masyarakat terhadap usulan sebagaimana disampaikan oleh anggota DPRD
5. Kepentingan politik, dimana usulan dari anggota DPR dan juga walikota dari hasil safari menjadi salah satu hal yang menjadi pertimbangan di tingkat kecamatan dan juga diintervensi pada tingkat musyawarah pada tingkat kota sehingga adanya penambahan realisasi pada rencana pembangunan di tingkat kecamatan padahal masyarakat melalui musrenbang tingkat kecamatan tidak muncul.

SIMPULAN

Proses pelaksanaan perencanaan pembangunan di kecamatan lima puluh sudah cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang menganut azas *bottom up planning* atau perencanaan dari lapisan paling bawah melalui penyerapan aspirasi. Namun pada tahapan pemutusan hasil di tingkat kota terjadi penambahan usulan oleh walikota yakni dari hasil safari walikota ke masyarakat dan juga ditambah dengan usulan

anggota DPRD melalui reses, sehingga terjadi penambahan realisasi padahal di tingkat kecamatan tidak diusulkan. Faktor penghambat dalam proses melaksanakan perencanaan pembangunan dan bahkan adanya usulan yang tidak diusulkan oleh berbagai pihak muncul dalam realisasi pembangunan. Antara lain rincian secara teknis, banyak usulan dan kurang pemahaman dalam pegusukan, keterbatasan daya tampung, dan keterbatasan kemampuan pemerintah dalam memenuhi keinginan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Maksum, Irfan Ridwan, 2008. *Seluk-Beluk Pemerintahan Daerah: Mencari Alternatif Memperkuat Negara Bangsa*. Depok: FISIP UI Press
- Nugroho, Riant, 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Prasojo, Eko, Irfan Ridwan Maksum, Teguh Kurniawan, 2006. *Desentralisasi & Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural*. Depok: DIA FISIP UI.
- Soesilo, Zauhar, 2002. *Reformasi Administrasi: Konsep, Dimensi, dan Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Subarsono, 2009, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wasistiono, Ismail Nurdin & M. Fahrurrozi, 2009. *Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa ke Masa*. Bandung: Fokusmedia
- Wasistiono, Sadu, 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintah Daerah*. Bandung: Fokusmedia.